



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)
KECAMATAN WERU
TAHUN 2023**

**Jl. Fatahillah No.16 Desa Setu Kulon
KECAMATAN WERU
KABUPATEN CIREBON**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Kecamatan Perubahan Weru Kabupaten Cirebon tahun 2023 merupakan penjabaran Visi, Misi, Bupati Cirebon yang disesuaikan dengan tujuan Propinsi Jawa Barat dan Nasional namun tetap bernuansa kedaerahan. Dalam hal ini Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon sebagai Perangkat Daerah mempunyai Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan.

Secara umum materi Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru tahun 2023 berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaiannya. Adapun Tujuan Kantor Kecamatan Weru yaitu Meningkatnya Produktivitas Masyarakat untuk Lebih Maju dan Unggul, sehingga menambah daya saing di Pasar Internasional, Nasional dan Regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah,

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun 2023 guna pencapaian dan sasaran dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Kedawung, September 2023

CAMAT WERU



HEVAZI ALDAHARY, S.Sos, M.Si

Pembina TK I

NIP. 19781207 200902 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftarisi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud Dan Tujuan	4
1.4.Sistematika Penulisan	4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Weru Tahun 2023	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru Tahun 2023	5
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Weru	11
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Weru	12
2.4. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2023	15
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru	15
3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2023	16
Bab IV Penutup	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 tahun tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata 2014 cara Penyusunan, Perencanaan ,Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2023 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Weru Tahun 2019-2024 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru memuat berbagai kegiatan

yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program serta Kegiatan dari Renstra Kecamatan Weru, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Kecamatan Weru adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 244).
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Ealuasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
- n. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 54 Seri E);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 seri D.5);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon;
- q. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
- r. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon (RPJMD) Tahun 2019 - 2024;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabputen Cirebon nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (nomor 1 Seri D);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 6 tahun 2021 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
- u. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru Tahun 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Weru untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini dapat dijadikan bahan kajian evaluasi diri lembaga dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Weru.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru Tahun 2023 adalah :
 1. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.
 2. Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target Tujuan dan Sasaran serta untuk mensinkronisasikan dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Weru Tahun 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Weru Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Weru

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2023

- 3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru
- 3.2. Program Dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN WERU TAHUN 2023

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN WERU
TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

A. Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 10 Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Weru Tahun 2023 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2023, realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Weru,

Pada tahun 2023 dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 434.976.114,00 dan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 228.101.256,00 atau 87,87 %. Target dan Capaian Kinerja telah tercapai sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Weru Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 61.336.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 55.552.400,00 sisa sebesar Rp. 5.783.800,00 atau tercapai sebesar 90,57,%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.987.328,00 dan terealisasi sebesar Rp.13.858.132,00 sisa sebesar Rp. 4.129.196,00 atau tercapai sebesar 77,04 %.

Output kegiatan adalah Jumlah jasa layanan listrik selama 1 tahun

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima

- b. Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.100.000,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 0,00%.

Output kegiatan adalah Jumlah kendaraan yang diurus perijinannya dan

terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 10 Kendaraan

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima

- c. Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.980.000,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100,00%.

Output kegiatan adalah Tersedianya jasa perbaikan/jumlah peralatan kerja yang diperbaiki sebanyak 3 Jenis

adalah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima

- d. Kegiatan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.889.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.002.100,00 sisa sebesar Rp.1.887.200,00 atau tercapai sebesar 88,12%.

Output kegiatan adalah Jumlah ATK yang disediakan sebanyak 21 Jenis

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima

- e. Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.406.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.359.700,00 sisa sebesar Rp.1.046.600 atau tercapai sebesar 76,24%.

Output kegiatan adalah Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan/jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan yang disediakan 7 Jenis

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima

- f. Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.996.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. Rp. 2.996.800,00 sisa sebesar Rp.0, atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 4 Jenis

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima

- g. Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.343.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.343.800,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

disediakan sebanyak 3 Jenis

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima

- h. Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.960.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.960.000,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 2 Media

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima

- i. Kegiatan Makanan dan Minuman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.540.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.540.000,00 sisa sebesar Rp.0 atau tercapai sebesar 100,00%.

Output kegiatan adalah tersedianya makan dan minum tamu selama 180 OK

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima

- j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.350.000,00 sisa sebesar Rp.2.850.000 atau tercapai sebesar 60,41%.

Output kegiatan adalah Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah sebanyak 24 Kali

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima

(2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pelaksanaan program dan kegiatan

Alokasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp.,00 sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 0,00 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 0,00%.

Output kegiatan adalah Jumlah Gedung kantor yang terpelihara sebanyak 1 Unit

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima.

- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.185.000,00 terealisasi sebesar Rp. 41.305.000,00 sisa sebesar Rp.1.880.000, atau tercapai sebesar 95,64%.

Output kegiatan adalah kendaraan dinas / Operasional yang dipelihara sebanyak 10 Kendaraan

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima

(3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaksanaan program dan kegiatan

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 2.946.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.946.500,00 sisa sebesar Rp.0, atau tercapai sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.436.500,00 terealisasi sebesar Rp. 1.436.500,00 sisa sebesar Rp.0 atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1 Laporan

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, Akuntabel dan Informatif

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.539.900,00 terealisasi sebesar Rp. 1.539.900,00 sisa sebesar Rp.0 atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah Jumlah laporan keuangan semesteran/Triwulanan 1 Laporan.

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, Akuntabel dan Informatif

3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran Rp. 2.039.900,00 terealisasi sebesar Rp. 2.039.900,00 sisa sebesar Rp.0 % atau tercapai sebesar Rp.100 %

Output kegiatan adalah Jumlah laporan keuangan Tahunan Badan/dinas sebanyak 1 Laporan

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, Akuntabel dan Informatif

(4). Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

Pelaksanaan program dan kegiatan

Alokasi anggaran untuk Program Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral sebesar Rp. 2.946.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.946.500,00 sisa sebesar Rp.0, atau tercapai sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.946.500,00 terealisasi sebesar Rp. 2.946.500,00 sisa sebesar Rp.0 atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Sektoral tersusun sebanyak 1 Laporan

Outcome kegiatan adalah Peningkatan Sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel

5). Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat

Alokasi anggaran untuk Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat sebesar Rp.111.483.800.,00 dan terealisasi sebesar Rp. 88.002.863,00 sisa sebesar Rp. 23.480.937,00 atau tercapai sebesar 78,93%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.660.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 34.760.000,00 sisa sebesar Rp. 7.900.000,00 atau tercapai sebesar 81,48%.

Output kegiatan adalah Jumlah Rapat Koordinasidan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 5 Kegiatan

Outcome kegiatan adalah Cakupan Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan kepada Camat

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.969.000,00 terealisasi sebesar Rp. 35.854.800,00 sisa sebesar Rp. 114.200,00 atau tercapai sebesar 99.68%.

Output kegiatan adalah Jumlah Rapat Koordinasi dan / atau Pembinaan dan / atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan

Sosial sebanyak 6 Kegiatan

Outcome kegiatan adalah Cakupan Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan kepada Camat

3. Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.088.000,00 terealisasi sebesar Rp. 45.859.600,00 sisa sebesar Rp. 228.400,00 atau tercapai sebesar 95,50 %.

Output kegiatan adalah Jumlah Rapat Koordinasi dan / atau Pembinaan dan / atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa sebanyak 4 Kegiatan

Outcome kegiatan adalah Cakupan Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan kepada Camat

4. kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.034.000,00 terealisasi sebesar Rp. 19.919.800,00 sisa sebesar Rp. 114.200,00 atau tercapai sebesar 99.43 %.

Output kegiatan adalah Jumlah Rapat Koordinasi dan / atau Pembinaan dan / atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum sebanyak 4 Kegiatan

Outcome kegiatan adalah Cakupan Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan kepada Camat

5. Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.780.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.780.000,00 sisa sebesar Rp,0 atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Jumlah Rapat Koordinasi dan / atau Pembinaan dan / atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa sebanyak 5 Kegiatan

Outcome kegiatan adalah Cakupan Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan kepada Camat

2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN KECAMATAN WERU

Secara umum, sebagian besar pelayanan di Kantor Kecamatan Weru dapat berjalan sesuai dengan target. Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan suatu Perangkat Daerah turut dipengaruhi oleh kapasitas keuangan di dalam Perangkat Daerah tersebut. Jumlah anggaran Kantor Kecamatan Weru dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon. Pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Kedawung dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Kondisi masyarakat yang selalu dinamis menuntut adanya pelayanan publik yang prima dan berkembang sesuai tuntutan perubahan waktu. Kondisi lingkungan eksternal ini akan berimplikasi sebagai peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis lingkungan eksternal tersebut dilakukan salah satunya melalui telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Untuk analisis Renstra K/L, SKPD Provinsi dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon tidak dapat dilakukan karena ketidaksediaan data.

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kantor Kecamatan Kedawung berupa arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang

Berkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan yang ada di kecamatan maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdapat banyak peluang dan tantangan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Weru. Peluang dan tantangan terbesar ke depan adalah terkait rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Weru. Sebagai pusat Kawasan Industri, yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta dampaknya terkait dengan pelayanan yang terdapat di Kecamatan Weru.

Peluang dan tantangan pelayanan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan pola ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2018 – 2033 , Kecamatan Weru yaitu antara lain :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial.
2. Monitoring dan Inventarisasi Data Jalan Umum dan Jalan Lingkungan serta Data Drainase.
3. Pengawasan Kebersihan Lingkungan.
4. Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
5. Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Pemukiman yang Belum Memiliki Listrik

6. Pelayanan Fasilitas dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Tata Bangunan,
7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah, Serta
8. Fasilitas Pendataan dan Pembinaan Usaha Formal.

Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan tersebut diarahkan di seluruh Desa di Kecamatan Weru.

2.3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang. Permasalahan pelayanan Kecamatan Weru berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6

Kinerja Pelayanan SKPD	Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah Kecamatan Kepada Masyarakat	RENSTR A Kecamatan Weru 2009-2014	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Komunikasi dengan Pihak Terkait - Pengembangan Data dan Informasi Pelayanan yang Akurat - Optimalisasi Penataan Kualitas Pelayanan Publik Baik Sarana Prasarana Maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana - Pengembangan Kinerja Pelayanan yang Memenuhi Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik - Pembinaan Tertib Administrasi Perkantoran 	Pembinaan dan Bimbingan pelaksanaan terkait tugas dan kewenangan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan komunikasi yg belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas - Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif - Fasilitas penunjang pelayanan terbatas
	Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan dan Inventarisir Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal
	Meningkatkan Kedisiplinan, Kerapihan dan Ketertiban Aparatur		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Metode dan Etos Kerja Aparatur	Peraturan Kepegawaian	Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal
	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Peraturan Keuangan	SDM aparatur yg memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Pengembangan Sistem Perencanaan yang terarah dan terukur	Peraturan Perencanaan Anggaran	Kualitas SDM aparatur yg memahami perencanaan & aturan anggaran terbatas
	Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat		<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan Memperhatikan Situasi dan Potensi yang ada di Wilayah Kecamatan - Pengembangan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Pembangunan bagi Masyarakat - Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan serta Memfasilitasi Kegiatan Pemerintah Desa 	Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	<ul style="list-style-type: none"> - Belum meratanya Infrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan - Koordinasi dan komunikasi dgn pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan

Dari tabel tersebut diatas terlihat kelemahan internal pelayanan di Kecamatan Weru berdasarkan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa faktor yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut antara lain :

1. Koordinasi dan komunikasi yang belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas.
2. Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif.

3. Fasilitas penunjang pelayanan terbatas.
4. Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal.
5. Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal.
6. Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas.
7. Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur yang memahami perencanaan dan aturan anggaran terbatas
8. Belum meratanya Infrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan.
9. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan.

2.4 PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan dan Penganggaran merupakan suatu kesatuan dan proses yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang dilanjutkan dengan musyawarah Perencanaan di tingkat Kecamatan. Proses perencanaan di Kecamatan Kedawung ada 3 (Tiga) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut dapat dilihat pada tabel Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kecamatan Kedawung Tahun 2021 sebagaimana data terlampir.

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi, Misi Perangkat Daerah yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria dalam perumusan sasaran yakni :

- a. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f. *Continously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Weru dapat dilihat pada lampiran

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2022

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program Kerja dan Kegiatan Kecamatan Weru Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah.

Urusan Kewenangan Kantor Camat Kedawung pada Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, diantaranya Administrasi Umum, Administrasi Keuangan , Serta Pelimpahan sebagian Kewenagna dari Bupati Kepada Camat, Kecamatan Weru dalam RPJMD Kabupaten Cirebon terfokus dengan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2024, adapun Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Kecamatan Weru Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel Berikut:

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH: 7-1.0-0.0-0.20. KECAMATAN WERU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2023					Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11		
7.	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01.	KECAMATAN											
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Meningkatnya Disiplin Aparatur		100 Prosen	100 Prosen	1.765.360.348	1.858.326.000	92.965.652				
		Meningkatnya pelayanan administrasi, perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima		100 Prosen	70 Prosen	100.337.652	98.873.596	(1.464.056)				
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima		100 Prosen	100 Prosen	34.999.900	37.860.100	2.860.200				
		Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informal		100 Prosen	100 Prosen	3.999.600	3.999.600	-				
		Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel		100 Prosen	100 Prosen	1.499.900	1.499.900	-				
		Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah			100 Prosen		42.891.400	42.891.400				
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	2.999.800	2.999.800	-				
7.01.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan perencanaan sektoral	Jl. Fatmahliah no 16 Weru	1 Laporan	1 Laporan	1.499.900	1.499.900	-	PIS	PIS		
		Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	Jl. Fatmahliah no 16 Weru		2 Dokumen							

7.01.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jl. Fatahillah no 16 Weru	1 Laporan	1 Laporan	1.499.900	1.499.900	-	-	PIS	PIS
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	Jl. Fatahillah no 16 Weru	1 BA	15 Laporan	-	-	-	-	-	-
7.01.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	11 Pegawai	12 Pegawai	1.765.360,348	1.858.326.000	92.965.652	-	PIS	PIS
7.01.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Jl. Fatahillah no 16 Weru	1 Laporan	1 Laporan	1.499.900	1.499.900	-	-	PIS	PIS
7.01.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan	Jl. Fatahillah no 16 Weru	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-
7.01.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Jl. Fatahillah no 16 Weru	1 Laporan	1 Laporan	999.800	999.800	-	-	PIS	PIS
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	Jl. Fatahillah no 16 Weru	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-
7.01.01.01.2.06.01.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jl. Fatahillah no 16 Weru	1 BA	1 BA	46.553.000	46.553.000	-	-	-	-
7.01.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jl. Fatahillah no 16 Weru	5 Jenis	1 Jenis	3.993.400	3.993.400	(100.000)	-	PIS	PIS
7.01.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Jl. Fatahillah no 16 Weru	6 Jenis	6 Jenis	-	10.645.400	10.645.400	-	PIS	PIS
7.01.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Jl. Fatahillah no 16 Weru	2 Jenis	2 Jenis	14.949.000	8.214.800	(6.734.200)	-	PIS	PIS
7.01.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman tamu yang disediakan	Jl. Fatahillah no 16 Weru	366 Ok	198 Ok	9.801.000	4.950.000	(4.851.000)	-	PIS	PIS

7.01.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jl. Fatahillah no 16 Weru	7 Jenis	11 Bulan	4.500.000	-	4.471.200	-	(28.800)	PIS	PIS
7.01.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jl. Fatahillah no 16 Weru	7 Jenis	7 Jenis	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jl. Fatahillah no 16 Weru	2 Media	2 Media	2.958.000	-	2.958.000	-	-	PIS	PIS
7.01.01.01.2.06.08.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	Jl. Fatahillah no 16 Weru	28 jenis	19 jenis	9.912.200	-	9.770.200	-	(142.000)	PIS	PIS
7.01.01.01.2.06.09.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Makanan dan Minuman tamu yang disediakan	Jl. Fatahillah no 16 Weru	366 Jamuan	0 Jamuan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.01.2.06.10.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas (dalam daerah)	Jl. Fatahillah no 16 Weru	80 Kali	22 Kali	3.600.000	-	1.650.000	-	(1.950.000)	PIS	PIS
7.01.01.2.07.05.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jl. Fatahillah no 16 Weru	1 BA	1 BA	42.386.000	-	42.386.000	-	-	-	-
7.01.01.01.2.07.10.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Jl. Fatahillah no 16 Weru	2 Jenis	2 Jenis	-	-	27.386.000	-	27.386.000	PIS	PIS
7.01.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jl. Fatahillah no 16 Weru	1 Unit	1 Unit	15.000.000	-	15.000.000	-	-	PIS	PIS
7.01.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang diadakan.	Jl. Fatahillah no 16 Weru	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-

7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Publik		100 Prosen	100 Prosen		10.119.900	10.119.900	-				
		Cakupan Penerimaan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat		100 Prosen	50 Prosen		204.734.800	156.441.800	(48.293.000)				
		Prosentase Peningkatan Penerimaan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100 Prosen		-	-	-				
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 BA	1 BA		39.288.000	39.288.000	-				
		Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan			1 Jenis		39.288.000	39.288.000	-				
7.01.02.2.01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jl. Fatmahliah no 16 Weru	30 Kegiatan	8 Kegiatan		47.052.000	39.288.000	(7.764.000)	PIS	PIS		
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan		1 BA	1 BA		38.160.000	38.160.000	-				
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jl. Fatmahliah no 16 Weru	24 Kegiatan	9 Kegiatan		42.714.000	38.160.000	(4.554.000)	PIS	PIS		
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Jl. Fatmahliah no 16 Weru		12 Laporan		-	-	-				
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1 BA	1 BA		89.113.700	89.113.700	-				
7.01.02.2.04.01.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan	Jl. Fatmahliah no 16 Weru		0 Laporan		-	-	-				

7.01.02.02.2.04.02.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Honorarium	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Honorarium yang dilaksanakan	Jl. Fatmahliah no 16 Weru	0 Kegiatan	0 Kegiatan	10.119.900	10.119.900	-	-	PIS	PIS
7.01.02.02.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Honorarium yang dilaksanakan	Jl. Fatmahliah no 16 Weru	30 Kegiatan	9 Kegiatan	114.999.800	78.993.800	(35.975.000)	-	PIS	PIS
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat	Jl. Fatmahliah no 16 Weru	100 Prosen	12 Laporan	46.852.000	40.048.000	(6.804.000)	-	-	-
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	1 BA	1 BA	40.048.000	40.048.000	-	-	-	-
7.01.03.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jl. Fatmahliah no 16 Weru	23 Kegiatan	11 Kegiatan	46.852.000	40.048.000	(6.804.000)	-	PIS	PIS
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETRINTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penindakan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	Jl. Fatmahliah no 16 Weru	100 Prosen	50 Prosen	66.838.000	96.980.000	29.142.000	-	-	-
7.01.04.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Terbatas Horisontal dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Presentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan PPKM Mikro yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	100 Prosen	-	35.000.000	35.000.000	-	PIS	PIS
		Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Terbatas Horisontal dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	-	1 Kegiatan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-

7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 BA	1 BA	61.980.000	61.980.000	-	-	PIS	PIS
7.01.04.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum di Wilayah Kecamatan	20 Kegiatan	11 Kegiatan	68.838.000	61.980.000	(6.858.000)	-	PIS	PIS
		Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum di Wilayah Kecamatan.		12 Laporan	-	-	-	-		
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat		100 Prosen	-	50.000.000	50.000.000	-		
7.01.05.05.2.01.02.	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Facilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		4 Laporan	-	50.000.000	50.000.000	-	PIS	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	100 Prosen	100 Prosen	8.679.900	5.799.900	(2.880.000)	-		
		Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa		100 Prosen	-	1.129.000	1.129.000	-		
7.01.06.2.01.	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 BA	1 BA	6.928.900	6.928.900	-	-		
7.01.06.06.2.01.06.	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pembinaan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pemilihan Kuwu)		2 Desa	-	1.129.000	1.129.000	-	PIS	

7 01 06 06 2 01 16.	fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Rapat Sinkronisasi dan Validasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jl. Fatmahliah no 16 Weru	0 Laporan	0 Laporan	0.679.900	5.799.900	(2.880.000)	PIS	PIS
		Jumlah Rapat Sinkronisasi dan Validasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Jl. Fatmahliah no 16 Weru	0 Laporan	0 Laporan	-	-	-		
		J U M L A H				2.245.422.000	2.403.969.196	158.547.196		

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Weru di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Weru sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2023. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weru yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Weru demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini tahun anggaran 2023, Kecamatan Weru telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2023, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Weru, September 2023


CAMAT WERU

HEVAZI ALDAHARY, S.SOS, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19781207 200902 1 001